

## Tantangan Pendanaan dan Investasi dalam Transisi Energi di Indonesia

Kurnia Haryakusuma S.E., MSc

Indonesia telah berkomitmen untuk menjalankan inisiatif strategis terkait transisi energi sesuai dengan Perjanjian Paris. Beberapa upaya yang dilakukan adalah seperti penetapan target nasional (NDC) untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29% pada tahun 2030, penyusunan kebijakan dan regulasi melalui Peraturan Presiden No 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang menjadi acuan dalam pengembangan energi terbarukan, dan yang tak kalah penting adalah tentang investasi pengembangan sumber-sumber energi terbarukan seperti biomassa, thermal, solar, tidal, dan lainnya. Namun, kendala utama dari pengembangan energi terbarukan adalah terkait sumber pendanaan dan investasi.

Opini ini memberikan beberapa poin mengenai tantangan pendanaan dan investasi transisi energi di Indonesia serta rekomendasi untuk menarik investor khususnya dengan menggunakan prinsip-prinsip yang ada pada ekonomi dan keuangan syariah seperti melarang riba, gharar, dan maysir dan juga keterkaitan dengan *Maqashid Sharia* sangat relevan dengan implementasi transisi energi di Indonesia.

Investasi dalam transisi energi di Indonesia menghadapi berbagai tantangan pendanaan yang signifikan. Tantangan pertama meliputi akses ke pembiayaan karena memerlukan *initial cost* yang cukup besar sedangkan sumber pendanaan tersedia masih terbatas. Bank dan Lembaga keuangan masih bersikap *reluctant* dalam memberikan pinjaman karena ketidakpastian ekonomi, regulasi yang belum stabil dan risiko teknologi.

Tantangan kedua adalah mengenai risiko valuasi dan ketidakpastian proyek, proyek



energi terbarukan di Indonesia sering kali dihadapkan pada risiko teknis dan finansial seperti fluktuasi harga sumber energi, perubahan teknologi, dan ketidakpastian dalam pengembalian investasi sehingga hal tersebut membuat investor tidak tertarik berinvestasi di sektor EBT di Indonesia.

Ketiga, kondisi makroekonomi dan kondisi pasar keuangan di Indonesia seperti tingkat suku bunga yang tinggi dibandingkan negara-negara lain membuat pembiayaan proyek transisi energi lebih mahal sehingga daya Tarik investasi di sektor ini dianggap tidak memberikan *competitive advantage* bagi investor. Serta, ketersediaan instrument investasi seperti *green bond* atau instrument investasi lainnya masih dianggap mahal bagi investor.

Tantangan-tantangan ini menunjukkan perlunya pendekatan holistik dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, lembaga keuangan seperti perbankan, dan masyarakat luas, untuk mempercepat transisi energi di Indonesia.

## Solusi

Sebagai contoh pada KTT G20 di Bali beberapa waktu lalu, Indonesia dengan beberapa negara membentuk kerjasama dalam bentuk *Just Energy Transition Partnership* (JETP) yang bertujuan mempercepat proses transisi energi di sektor ketenagalistrikan. Hal ini didasari karena isu pendanaan yang minim seperti porsi dana hibah yang terlalu rendah, ketidakpastian iklim investasi yang mendukung, serta pendalaman pasar keuangan yang bergerak di bidang transisi energi yang terbatas.

Indonesia dengan mayoritas negara dengan penduduk muslim sebesar 87% memiliki potensi untuk mendukung transisi energi melalui keterlibatan pada investasi pada sumber energi terbarukan untuk mengakselerasi transisi energi. Saat ini, *green sukuk* atau instrument keuangan syariah yang tersedia di pasar dapat dimaksimalkan perannya melalui integrasi dengan sektor perbankan, keuangan sosial, dan halal industri.

Fokus transisi energi ini dimulai dari sektor yang paling banyak menghasilkan gas rumah kaca seperti transportasi, industri, pertanian, perumahan, dan lainnya. Sebagai contoh penerapan *Islamic Green Finance* yang dapat dilakukan seperti melakukan Kerjasama dengan *Islamic bank* dan perusahaan penyedia perumahan terjangkau yang berbasis *environment friendly* melalui skema *mortgage-backed securities* (MBS) yang dilakukan melalui *framework Social Responsibility Investing* Sukuk. Peran yang dimainkan *Islamic Green Finance* berfungsi sebagai pasar baru di mana para pelaku ekonomi, politik, dan sosial yang mewakili berbagai peran dan kapasitas menjadi satu dalam tujuan yang sama. Sektor publik dan swasta memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan keuangan hijau syariah, *project finance* sesuai dengan prinsip syariah dapat dilakukan dan tidak hanya terbatas pada proyek-proyek utama, tetapi juga dapat mendukung proyek-proyek turunan dari proyek-proyek hijau. Industri ini harus melihat dari seluruh perspektif rantai nilai, termasuk masalah pasca-iklim seperti sukuk kredit karbon. Tentunya, hal ini ditunjang oleh inovasi pada

*Islamic Green Finance* yang dapat menghasilkan produk-produk inovatif untuk menetapkan tren masa depan dalam pembiayaan berkelanjutan. Inovasi tersebut harus dimanfaatkan dengan memiliki lebih banyak emiten proyek hijau yang potensial yang masuk ke pasar dengan menciptakan berbagai jenis produk dan proyek.

Insentif Sangat penting untuk menjadi daya tarik investor dalam mendorong penanaman modal pada sektor pembiayaan hijau. Adanya pergeseran tren investor *institutional* untuk menjadi investor yang sadar terhadap isu lingkungan mencerminkan bahwa permintaan terhadap instrument keuangan hijau akan meningkat pada beberapa tahun mendatang. Memanfaatkan momentum ini, permintaan terhadap produk investasi hijau dari berbagai macam investor yang diprediksi mengalami pertumbuhan yang optimis tentang perkembangan investasi hijau melalui peran keuangan syariah yang dapat menjadi katalisator untuk pertumbuhan pembangunan hijau secara global.

Peluang lain untuk menggabungkan keuangan syariah dengan tujuan sosial dan lingkungan hidup adalah filantropi yang mencakup lembaga sedekah dan wakaf. Sukuk yang didasarkan pada model wakaf mungkin tidak terbatas pada unsur berwujud dan kekekalan saja. Konferensi ini membahas bahwa dalam sejarah peradaban Islam, praktik wakaf di masa lalu telah memberikan dampak sosial dan berkelanjutan. Dengan menggabungkan keahlian para ahli syariah dan ahli lingkungan, standar lingkungan yang sesuai dengan syariah

Sebagai penunjang dari inovasi produk pada keuangan syariah di sektor ekonomi hijau. Muamalat Institute dapat menjadi partner untuk meningkatkan kompetensi dan SDM khususnya dalam keuangan syariah melalui pelatihan bermutu untuk menghasilkan ahli-ahli di bidang ekonomi dan keuangan syariah yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.

---

**Muamalat Institute** atau MI merupakan lembaga edukasi ekonomi dan keuangan syariah yang fokus pada pelatihan, konsultasi, penelitian dan publikasi, MI mempublikasikan tulisan ini dalam rangka meningkatkan literasi syariah ke masyarakat dengan terus berkontribusi dalam melakukan sosialisasi dan literasi keuangan syariah untuk kemajuan dan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Islamic Green Finance Development, Ecosystem And Prospects (2020), World Bank. [https://www.isdb.org/sites/default/files/media/documents/2022-02/IsDB\\_Climate\\_Action\\_Plan\\_2020%20-%202025%5B12%5D.pdf](https://www.isdb.org/sites/default/files/media/documents/2022-02/IsDB_Climate_Action_Plan_2020%20-%202025%5B12%5D.pdf)